

Disperindag Buton Selatan Susun Strategi Hidupkan Aktivitas Ekonomi di Pasar Rakyat Milik Pemerintah



Kadis Perindag Busel La Ode Safi bersama Staf sedang melakukan kerja bakti

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Buton Selatan tetap berupaya menghidupkan kembali aktivitas pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi fasilitas, distribusi pedagang, hingga penguatan pengelolaan pasar yang selama ini belum berjalan maksimal.

Upaya tersebut difokuskan pada sejumlah pasar yang mengalami penurunan aktivitas, bahkan tidak lagi beroperasi, seperti di wilayah Lapandewa, Siompu, dan Siompu Barat. Pasar-pasar

Lanjut ke Hal: 7

Bulog Baubau dan Disperindag Salurkan 8.900 Liter Minyak Kita di Pasar Wameo Untuk Cegah Gejolak Harga Minyak Goreng



Perum Bulog Cabang Baubau bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Baubau menyalurkan 8.900 liter minyak goreng merek Minyak Kita

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Perum Bulog Cabang Baubau bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Baubau menyalurkan 8.900 liter minyak goreng merek Minyak Kita di Pasar Wameo, Kota Baubau, Jumat (17/4/2026). Penyaluran ini dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di tingkat pedagang.

Kegiatan distribusi tersebut difokuskan di

salah satu pusat perdagangan utama Kota Baubau yaitu di Pasar Wameo yang menjadi barometer harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah bersama Bulog menilai pasar rakyat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen.

Pimpinan Perum Bulog Cabang Baubau Ritno mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya antisipasi meskipun kondisi pasokan minyak goreng di wilayah tersebut masih dalam keadaan stabil.

“Sebetulnya minyak goreng saat ini tidak mengalami kelangkaan. Namun kami tetap melakukan penyaluran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan pasokan yang bisa memicu kenaikan harga,” ujar Ritno.

Ia menambahkan bahwa harga Minyak Kita di pasar tradisional di Baubau saat ini masih berada pada level normal, yakni sekitar Rp15.700 per liter.

Penyaluran minyak goreng tersebut dilakukan kepada 30 mitra Bulog

Lanjut ke Hal: 7

Kesbangpol Baubau Tuntaskan Seleksi Paskibraka 2026, 75 Pelajar Resmi Terpilih, Enam Wakil ke Tingkat Provinsi



Pemerintah Kota Baubau menargetkan capaian prestasi hingga tingkat nasional setelah merampungkan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menargetkan capaian prestasi hingga tingkat nasional setelah merampungkan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 dengan menetapkan 75 pelajar terbaik sebagai wakil daerah.

Target tersebut mengemuka seiring ditetapkannya enam pelajar terbaik “tiga putra dan tiga putri” yang diproyeksikan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari pada Mei

mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Baubau, Aliman, SE, menyatakan optimisme pemerintah daerah terhadap kemampuan para delegasi tersebut dalam mengulang capaian sebelumnya.

“Target utama kami adalah menembus tingkat nasional. Baubau punya rekam jejak yang baik dalam pengiriman Paskibraka ke pusat,” ujar Aliman usai bertemu Wali Kota Baubau di Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (13/04/2026).

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah mematangkan persiapan teknis pemberangkatan peserta ke Kendari, termasuk kesiapan fisik, mental, dan administrasi.

Menurut Aliman, proses seleksi tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada awal hingga pertengahan Mei 2026, sehingga waktu persiapan yang tersisa akan dimanfaatkan secara optimal.

“Kami segera menuntaskan seluruh kebutuhan administrasi dan teknis

Lanjut ke Hal: 7

Dorong Ekonomi Pesisir, KKP Tinjau Lima Desa di Buton Selatan Masuk Kajian Kampung Nelayan Nasional



Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengkaji sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai kandidat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengkaji sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai kandidat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi berbasis

kelautan.

Survei lapangan tersebut dilakukan sejak Senin (13/4/2026) dengan menyalur beberapa desa yang dinilai memiliki potensi perikanan yang kuat. Kegiatan ini melibatkan tim dari KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Buton Selatan.

Pelaksana Tugas Kepala DKP Buton Selatan, Nafiruddin, menyebutkan bahwa ada lima desa yang diusulkan dalam program

tersebut. “Kami mengusulkan lima lokasi yang tersebar di wilayah pesisir strategis Buton Selatan,” ujarnya kepada awak media.

Kelima desa tersebut yakni Desa Gaya Baru di Kecamatan Lapandewa, Desa Bahari II di Kecamatan Sampolawa, Desa Batuatas Timur di Kecamatan Batuatas, Desa Lamanninggara di Kecamatan

Lanjut ke Hal: 7

Disperindag Buton Selatan Susun Strategi Hidupkan Aktivitas Ekonomi di Pasar Rakyat Milik Pemerintah

tersebut sebelumnya sempat aktif, namun kini sepi akibat minimnya pedagang dan pembeli serta keterbatasan akses penduduk.

Kepala Disperindag Buton Selatan, La Ode Safi, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan untuk memetakan persoalan yang dihadapi di masing-masing pasar. "Kami sudah turun langsung ke lapangan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar pasar-pasar ini bisa kembali aktif," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Selain pasar yang tidak aktif, persoalan lain yang mencuat adalah banyaknya kios yang belum dimanfaatkan oleh pedagang. Kondisi ini terjadi di beberapa pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah, seperti di pasar yang ada di Bandar Batauga.

Menurut La Ode Safi, sebagian kios belum digunakan karena kondisi fasilitas yang belum memadai. Kerusakan bangunan, jaringan listrik yang belum berfungsi optimal, serta pasokan air bersih yang tidak lancar menjadi kendala utama.

"Sebagian kios sebenarnya sudah ada jaringan listrik, tetapi belum berfungsi maksimal. Air bersih juga belum lancar, sehingga pedagang belum merasa nyaman," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera memanggil pemilik kios untuk membahas pemanfaatan lapak yang masih kosong. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas jual beli kembali berjalan.

Distribusi pedagang yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri. Kios yang berada di bagian depan pasar cenderung terisi, sementara bagian belakang masih kosong.

"Kebiasaan masyarakat yang lebih memilih berbelanja di pinggir pasar membuat kios di dalam kurang diminati," ungkapnya.

Dari sisi aktivitas, pasar di Buton Selatan umumnya beroperasi pada hari tertentu, yakni Rabu, Jumat, dan Minggu, dengan puncak keramaian terjadi pada hari Minggu. Pada hari tersebut, lanjutnya, pedagang dari luar daerah turut meramaikan pasar dengan berbagai komoditas.

Di sisi lain, keter-

batasan fasilitas pendukung juga masih dirasakan pedagang. Di Pasar Rakyat Sampolawa, misalnya, pedagang ikan dan sayur belum memiliki tempat permanen dan masih berjualan secara swadaya.

Tidak hanya itu, kekurangan tenaga operasional seperti petugas kebersihan, keamanan, dan mandor pasar turut memengaruhi kualitas pengelolaan pasar. Minimnya anggaran membuat kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal.

Meski demikian, Disperindag tetap berupaya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. "Kami tetap berusaha agar pelayanan berjalan, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan pasar," ujar La Ode Safi.

Dalam konteks yang lebih luas, revitalisasi pasar rakyat merupakan bagian penting dari strategi penguatan ekonomi lokal. Secara historis, pasar tradisional di Indonesia telah menjadi tulang punggung distribusi barang sejak era kerajaan hingga masa kolonial, sebelum berkembangnya pasar modern pada

akhir abad ke-20.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pasar rakyat masih menyumbang lebih dari 60 persen distribusi kebutuhan pokok nasional, meskipun menghadapi tekanan dari ritel modern dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Secara global, tren revitalisasi pasar tradisional juga terjadi di berbagai negara berkembang. Organisasi seperti UN-Habitat mencatat bahwa penguatan pasar lokal menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, terutama pascapandemi COVID-19.

Sejalan dengan itu, Disperindag Buton Selatan juga terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemerintah daerah berharap pasar rakyat tetap dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Optimalisasi pasar dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi saat ini. (*)

Dorong Ekonomi Pesisir, KKP Tinjau Lima Desa di Buton Selatan Masuk Kajian Kampung Nelayan Nasional

Siompu Barat, serta Desa Kaofe di Kecamatan Kadatua.

Menariknya, tahapan survei tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap untuk memastikan kualitas kajian. Setelah dua lokasi awal, tim dijadwalkan melanjutkan peninjauan pada Selasa (14/4/2026) ke wilayah lainnya.

"Setelah Gaya Baru dan Bahari II, kami lanjut ke Batu-atas Timur, kemudian Siompu Barat dan Kadatua," kata Nafiruddin.

Ia menegaskan, survei ini tidak hanya melihat kondisi fisik wilayah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program.

"Penilaian kami meliputi kesiapan geografis, sosial masyarakat, hingga potensi ekonomi berbasis perikanan," jelasnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan, termasuk modernisasi kawasan

pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Secara historis, program pengembangan kampung nelayan di Indonesia telah berjalan sejak era awal kelautan perikanan terpadu (SKPT). Namun, konsep Kampung Nelayan Merah Putih dinilai lebih terintegrasi karena menggabungkan pembangunan infrastruktur, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Di tingkat global, model serupa juga diterapkan di sejumlah negara maritim seperti Jepang dan Norwegia, yang sukses membangun desa nelayan modern berbasis teknologi dan koperasi. Indonesia berupaya mengadopsi pendekatan tersebut dengan menyesuaikan kondisi lokal.

Nafiruddin berharap Buton Selatan dapat masuk dalam daftar prioritas pembangunan. "Kami optimistis daerah ini layak karena potensi sumber daya lautnya sangat besar," ujarnya.

Ia juga menam-

bahkan bahwa keberadaan masyarakat nelayan yang cukup dominan menjadi faktor pendukung utama dalam program tersebut.

Sebelumnya, pada 2025, Buton Selatan telah lebih dulu mendapatkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa. Program tersebut menjadi pijakan awal dalam pengembangan kawasan pesisir di daerah itu.

"Pengalaman tahun lalu menjadi modal penting bagi kami untuk pengembangan berikutnya," kata Nafiruddin.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan.

Dengan proses survei yang sedang berlangsung, hasil kajian dari KKP nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi prioritas pembangunan, yang diharapkan mampu membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Buton Selatan. (*)

Kesbangpol Baubau Tuntaskan Seleksi Paskibraka 2026, 75 Pelajar Resmi Terpilih, Enam Wakil ke Tingkat Provinsi

agar peserta siap mengikuti seleksi di tingkat provinsi," katanya.

Sementara itu, secara keseluruhan, seleksi Paskibraka tingkat Kota Baubau diikuti oleh 141 pelajar yang telah melalui berbagai tahapan seleksi lanjutan.

Dari jumlah tersebut, panitia menetapkan 75 peserta yang dinyatakan lolos, terdiri atas 40 putra dan 35 putri yang dinilai memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan.

Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan menitikberatkan pada kesiapan fisik, kedisiplinan, serta kemampuan dasar baris-berbaris yang menjadi standar utama Paskibraka.

"Kami memastikan seluruh peserta yang terpilih berada dalam kondisi fisik yang prima dan memenuhi standar nasional," kata Aliman.

Ia juga menegaskan

kan bahwa nama-nama peserta yang akan mewakili Baubau ke tingkat provinsi belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu penerbitan surat keputusan.

"Kami memilih menahan publikasi nama untuk menjaga kondusivitas serta memastikan seluruh prosedur administrasi berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Secara historis, Paskibraka merupakan bagian penting dari tradisi kenegaraan Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 di Jakarta.

Dalam perkembangannya, pembentukan Paskibraka secara nasional mulai terstruktur sejak era 1960-an dan terus mengalami penyempurnaan hingga kini di bawah pembinaan pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Di tingkat internasional, tradisi pengibaran bendera dalam upacara kenegaraan juga menjadi simbol kedaulatan dan identitas bangsa, seperti yang terlihat dalam berbagai perayaan hari nasional di sejumlah negara.

Keikutsertaan pelajar dalam Paskibraka tidak hanya menjadi ajang pembinaan fisik dan disiplin, tetapi juga sarana pembentukan karakter kebangsaan serta kepemimpinan generasi muda.

Dengan selesainya seleksi tingkat kota, Pemerintah Kota Baubau berharap para peserta dapat menjaga konsistensi latihan dan menunjukkan performa terbaik pada tahapan seleksi berikutnya.

"Kami berharap mereka mampu mengharumkan nama Baubau dan Sulawesi Tenggara di tingkat yang lebih tinggi," pungkas Aliman. (*)

Bulog Baubau dan Disperindag Salurkan 8.900 Liter Minyak Kita di Pasar Wameo Untuk Cegah Gejolak Harga Minyak Goreng

yang beroperasi di Pasar Wameo, dengan masing-masing menerima alokasi rata-rata sekitar 120 liter. Selain mitra resmi, kata Rino, distribusi juga menjangkau pedagang lain di sekitar pasar.

"Setiap mitra kami mendapatkan distribusi kurang lebih 120 liter, dan sebagian juga dialokasikan kepada pedagang lain di luar mitra Bulog," kata Ritno.

Selain di Kota Baubau, Bulog juga memperluas distribusi ke wilayah lain seperti Buton Tengah serta beberapa daerah yang berada dalam cakupan kerja distribusi pangan Bulog setempat.

Total stok Minyak Kita yang tersimpan di gudang Bulog Baubau saat ini tercatat sekitar 90.000 liter. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat

dalam beberapa waktu ke depan.

Penyaluran secara berkala ini dilakukan melalui mekanisme distribusi langsung ke pedagang pasar rakyat agar harga tetap terkendali dan tidak terjadi penumpukan permintaan di titik tertentu.

Kondisi ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, terutama pada komoditas minyak goreng yang memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.

Dalam konteks nasional, Indonesia pernah mengalami gejolak harga minyak goreng pada awal 2022. Saat itu, kelangkaan sempat terjadi di berbagai daerah akibat gangguan rantai pasok global dan kebijakan pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang memicu kepanikan pasar domestik.

Krisis tersebut

bahkan mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah intervensi, termasuk penetapan harga eceran tertinggi dan pelarangan sementara ekspor CPO demi menjaga ketersediaan dalam negeri.

Secara global, pasar minyak nabati juga kerap dipengaruhi oleh dinamika internasional, termasuk dampak konflik geopolitik seperti perang di Ukraina yang sempat mengganggu rantai pasok minyak nabati dunia serta mendorong volatilitas harga komoditas pangan.

"Stok yang ada di gudang Bulog Baubau saat ini masih aman, sekitar 90.000 liter, dan kami pastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi potensi kenaikan permintaan," ujar Ritno menegaskan.

=Sementara itu, Disperindag Kota

Baubau menilai sinergi dengan Bulog menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar tradisional seperti di Pasar Wameo Kota Baubau. Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi lonjakan harga yang biasanya terjadi pada periode tertentu.

Kolaborasi ini penting untuk memastikan harga tetap stabil dan masyarakat tidak terdampak fluktuasi pasar," kata salah satu pejabat Disperindag Baubau.

Dengan ketersediaan stok yang memadai serta distribusi yang terus dilakukan secara berkala, pemerintah daerah bersama Bulog memastikan stabilitas harga minyak goreng di Kota Baubau tetap terjaga dan pasokan aman untuk kebutuhan masyarakat. (*)

Pendapatan Daerah Hampir 100 Persen, DPRD Bahas LKPJ 2025 yang Disampaikan Bupati Buton Tengah Dr Azhari



Laporan: Alwan

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menargetkan penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar sebagai langkah strategis ke depan, menyusul sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi sepanjang 2025. Fokus ini mengemuka dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

LKPJ tersebut disampaikan oleh Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Senin (6/4/2026). Agenda ini berlangsung di ruang sidang DPRD dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Mazaluddin, S.E.

Dalam paparannya, Bupati Azhari mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp839,08 miliar atau 98,80 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.

"Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal dan membuka ruang pembiayaan pembangunan," ujar Azhari dalam forum tersebut.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp22,68 miliar atau 100,01 persen dari target. Meski melampaui target, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp802,33 miliar atau 88,44 persen dari total pagu Rp907,12 miliar. Angka ini mencerminkan tingkat serapan anggaran yang cukup baik, meski belum optimal.

Selain aspek keuangan, sejumlah indikator kinerja daerah menunjukkan capaian yang melampaui target. Sektor pariwisata mencatat realisasi hingga 186,15 persen, sedangkan pertumbuhan investasi daerah mencapai 222,22 persen.

Kinerja sektor lingkungan hidup dan tata ruang juga melampaui target, diikuti stabilitas pangan dan produksi pertanian yang terjaga hingga 100 persen. Pemerintah daerah juga melaporkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD serta masyarakat," kata Azhari.

Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya belum optimalnya jaringan irigasi, rendahnya ca-

paian sektor UMKM dan ketenagakerjaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Buton Tengah akan mendorong perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar.

"Kami menyadari masih banyak yang perlu dimaksimalkan dan diperbaiki ke depan," ujar Azhari.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan pengawasan.

"Melalui forum ini, kami mengharapkan masukan konstruktif dari DPRD sebagai fungsi check and balance," tambahnya.

Secara kontekstual, penyampaian LKPJ merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas publik yang telah diatur sejak era reformasi, terutama pasca diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam skala nasional, tren peningkatan pendapatan daerah juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia pascapandemi COVID-19, seiring

dengan pemulihan ekonomi yang didorong oleh investasi dan belanja pemerintah.

Secara global, lembaga seperti IMF dan Bank Dunia juga mencatat bahwa pemerintah daerah di berbagai negara berkembang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan fiskal lokal dan efisiensi belanja publik.

Tahun 2025 sendiri merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 di Buton Tengah, sekaligus masa transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2030.

Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap dapat terus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Azhari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan visi daerah yang maju dan sejahtera.

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat Buton Tengah," tutupnya. (*)

Revisi RUU Pemilu Bergulir, DPR Ungkap 10 Agenda Perubahan Krusial



JAKARTA, BP- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai memantapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang masuk dalam program legislasi prioritas 2026 dengan menyoroti 10 isu strategis yang mencakup aspek teknis hingga kelembagaan penyelenggara pemilu.

Pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal, yakni penyusunan naskah akademik dan draf regulasi oleh Komisi II DPR bersama Badan Keahlian Dewan (BKD). Namun, dinamika politik telah mulai mengerucut pada sejumlah isu krusial yang dinilai menentukan arah sistem pemilu ke depan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu hampir selalu diwarnai isu-isu yang berulang, meskipun sebagian telah diperbarui mengikuti perkembangan hukum dan putusan pengadilan.

"Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa setidaknya ada 10 isu yang pasti mengemuka setiap kali kita membahas undang-undang pemilu," ujar Doli di kompleks parlemen, Rabu (15/4).

Menurut dia, sebagian dari isu tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait ambang batas pencalonan presiden yang diminta untuk dihapuskan.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan sistem pemilu legislatif. DPR membuka opsi mempertahankan sistem proporsional terbuka, beralih ke sistem tertutup, atau mengadopsi sistem campuran.

Selain itu, pembahasan juga mencakup ambang batas parlemen yang hingga kini

belum mencapai kesepakatan antarfraksi, serta penyesuaian jumlah kursi di daerah pemilihan yang dinilai perlu diselarasakan dengan dinamika kependudukan.

Doli juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem konversi suara menjadi kursi, yang selama ini kerap diperdebatkan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan representasi.

"Perubahan ini penting agar sistem pemilu kita lebih adil dan tidak menimbulkan distorsi terhadap suara rakyat," kata Doli.

Lebih lanjut, DPR juga akan membahas pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Isu lain yang tak kalah penting adalah upaya menekan praktik politik uang dan pembelian suara. DPR menilai reformasi sistem diperlukan untuk meningkatkan integritas pemilu.

"Perbaiki sistem harus mampu menekan praktik money politic yang masih menjadi persoalan klasik dalam setiap pemilu," ujar Doli.

Dalam konteks modernisasi, digitalisasi tahapan pemilu juga menjadi agenda penting. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi penyelenggaraan.

DPR turut mengevaluasi kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk mekanisme seleksi dan komposisi anggotanya, guna memastikan independensi dan profesionalitas lembaga tersebut.

"Nantinya akan dibahas bagaimana mekanisme seleksi yang menjamin penyelenggara tetap independen, imparial, dan berintegritas," kata Doli.

Selain itu, penyelesaian sengketa pemilu menjadi isu terakhir yang akan dibahas, termasuk wacana pem-

bentukan peradilan khusus pemilu.

Secara historis, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem pemilu sejak era reformasi, mulai dari sistem proporsional tertutup pada Pemilu 1999 hingga sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009.

Perubahan tersebut tidak lepas dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam membentuk kerangka hukum pemilu nasional.

Dalam konteks global, sejumlah negara seperti Jerman dan Selandia Baru telah menerapkan sistem campuran yang menggabungkan proporsional dan distrik, sebagai upaya menyeimbangkan representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

Sementara itu, negara seperti India tetap menggunakan sistem distrik mayoritas, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu model pemilu yang berlaku universal.

Doli mengingatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu harus dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa menjelang tahapan pemilu berikutnya.

"Kita harus hindari pembahasan yang terburu-buru agar hasilnya tetap objektif dan berkualitas," ujarnya.

Rapat lanjutan Komisi II DPR yang semula dijadwalkan untuk membahas progres naskah akademik pun sempat ditunda tanpa penjelasan rinci, meskipun DPR menargetkan pembahasan dapat selesai sebelum tahapan seleksi penyelenggara pemilu dimulai pada Agustus mendatang.

Dengan berbagai isu yang mengemuka, pembahasan RUU Pemilu 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda politik paling strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. (*)

Harmoni Sultra Angkat Pangan Lokal, Chef Juna Jadi Juri Utama Lomba

HALO WARGA SULTRA, CHEF JUNA BAKAL MERIAHKAN SEMARAK HUT-62 SULTRA DI FESTIVAL BOKORI LOH..

CEK KESERUANNYA DI SINI >



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Lomba cipta menu pangan lokal di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu agenda utama dalam perhelatan Harmoni Sultra yang mendorong inovasi kuliner berbasis bahan pangan daerah, sekaligus memperkuat identitas gastronomi lokal di tengah arus modernisasi.

Kegiatan ini menghadirkan Chef Juna sebagai juri utama, yang secara langsung menilai kreativitas peserta dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi hidangan modern, menarik, dan bernilai gizi tinggi.

Kehadiran Chef Juna dalam ajang tersebut difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan konsumsi pangan lokal.

"Pangan lokal Indonesia punya potensi besar untuk diolah

menjadi hidangan kelas dunia jika dikemas dengan inovasi dan teknik yang tepat," ujar Chef Juna dalam salah satu sesi penilaian.

Lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha kuliner untuk lebih mengenal serta memanfaatkan kekayaan bahan pangan lokal yang tersedia di daerah.

Menurut penyelenggara, kegiatan ini bertujuan mendorong diversifikasi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor melalui inovasi berbasis kearifan lokal.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat ekosistem pangan lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk daerah," kata perwakilan Bank Indonesia Sultra dalam sambutannya.

Secara historis, upaya penguatan pangan lokal di Indonesia telah men-

jadi bagian dari kebijakan nasional sejak era diversifikasi pangan pada dekade 1970-an, yang bertujuan mengurangi dominasi beras sebagai makanan pokok utama.

Di tingkat global, gerakan pemanfaatan pangan lokal juga berkembang pesat melalui konsep local food movement yang mulai populer di Amerika Serikat dan Eropa sejak awal 2000-an, sebagai respons terhadap isu ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Sulawesi Tenggara sendiri dikenal memiliki beragam bahan pangan lokal seperti sagu, ubi, jagung, dan hasil laut yang melimpah, yang selama ini belum sepenuhnya diolah menjadi produk bernilai tinggi di pasar modern.

"Ini kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bahwa makanan tradisional bisa tampil modern tanpa kehi-

langan identitasnya," ujar salah satu peserta lomba.

Dalam proses penilaian, aspek rasa, tampilan, inovasi, serta kandungan gizi menjadi indikator utama yang digunakan oleh dewan juri.

Kegiatan Harmoni Sultra diharapkan mampu menjadi agenda tahunan yang tidak hanya mempromosikan budaya daerah, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis kuliner.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, ajang ini diharapkan mampu melahirkan inovator kuliner baru yang dapat membawa pangan lokal Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional bahkan internasional.

"Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjadi wadah pengembangan kuliner lokal yang berdaya saing," tambah penyelenggara. (*)

Kekerasan Perempuan di Dunia Digital Naik, Pengawasan Platform Diperketat



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pemerintah memperketat pengawasan terhadap platform digital menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang siber dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pengguna serta mendorong tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menekan penyebaran konten berbahaya.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan bahwa tingginya angka laporan kekerasan seksual berbasis online belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ia menilai masih banyak korban yang belum berani atau belum mampu melaporkan kasus yang dialaminya.

"Keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan di wilayah kepulauan dan daerah 3T menjadi hambatan utama korban dalam mengakses bantuan," ujar Maria dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta.

Data terbaru menunjukkan, rata-rata terdapat sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan perempuan di ruang digital setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.600 kasus didominasi oleh kekerasan seksual berbasis online.

Secara historis, tren peningkatan ini telah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Catatan Komnas Perempuan

menunjukkan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, interaksi digital meningkat tajam, diikuti lonjakan kasus kekerasan berbasis siber. Fenomena serupa juga terjadi secara global, sebagaimana dilaporkan oleh UN Women yang mencatat satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan berbasis digital.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab utama dalam menangani setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam sistem mereka.

"Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganannya di dalam adalah mereka," kata Meutya dalam audiensi bersama Komnas Perempuan di Jakarta Selatan, Rabu (15/04/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap memiliki kewenangan intervensi apabila ditemukan pelanggaran serius yang membahayakan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

"Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa dikenakan sanksi sampai pada penutupan," tegasnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan Komnas Perempuan juga diperkuat melalui mekanisme pemutusan akses (take down) terhadap konten yang mengandung kekerasan seksual maupun eksploitasi di ruang

digital.

Menurut Maria, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan korban.

"Kondisi ini membutuhkan langkah bersama, termasuk peningkatan tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang aman bagi pengguna," ujarnya.

Selain penindakan, upaya preventif juga menjadi perhatian melalui penguatan literasi digital masyarakat. Edukasi publik dinilai penting agar pengguna mampu mengenali, mencegah, serta melaporkan berbagai bentuk kekerasan di dunia maya.

Secara internasional, sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan regulasi ketat terhadap platform digital, seperti Digital Services Act di Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan teknologi bertanggung jawab terhadap konten berbahaya di platform mereka. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama dengan memperkuat kebijakan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pemerintah berharap langkah terpadu ini dapat menekan angka kekerasan berbasis digital sekaligus memastikan ruang siber menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna. (*)

Bupati Azhari Letakkan Batu Pertama Masjid Al-Karim Lakudo Buton, Dorong Sentra Pendidikan



Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Al-Karim di Desa Wongko Lakudo, Kecamatan Lakudo Senin (6/4/2026)

Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pembangunan Masjid Al-Karim di Desa Wongko Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah resmi dimulai setelah Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., melakukan peletakan batu pertama, Senin (6/4/2026). Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya proyek yang diharapkan tidak hanya menghadirkan tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat.

Kegiatan yang berlangsung di pelataran masjid itu dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, di antaranya Wakapolres Buton Tengah Kompol Nursaji, S.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muh. Said, S.T., Camat Lakudo, Kepala Desa Wongko Lakudo, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Azhari menekankan bahwa pembangunan masjid memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik. Ia mengingatkan bahwa setiap kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut bernilai ibadah jangka panjang.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama menanam amal jariah. Insha Al-

lah, setiap kontribusi yang dilandasi keikhlasan akan menjadi bekal berharga di akhirat," ujar Azhari.

Lebih jauh, ia menilai keberadaan masjid perlu dioptimalkan sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Menurutnya, masjid memiliki potensi besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keagamaan.

Ia bahkan mendorong agar kawasan Masjid Al-Karim dikembangkan menjadi pusat pendidikan terpadu. Rencana tersebut meliputi pembangunan pondok pesantren, lembaga tahfiz Al-Qur'an, hingga fasilitas pendidikan formal dari tingkat dasar sampai menengah.

"Jika tersedia lahan tambahan, mari kita bangun pondok pesantren atau yayasan hafiz Al-Qur'an," katanya.

Gagasan tersebut, lanjutnya, membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Lakudo yang berada di luar daerah. Partisipasi dapat dilakukan melalui wakaf lahan maupun kontribusi dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis masjid.

"Kolaborasi ini penting agar manfaat masjid bisa dirasakan lebih luas, terutama bagi masyarakat kurang mampu," tambahnya.

Di sisi lain, Azhari juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerendahan hati dalam kehidupan. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekayaan hanyalah titipan yang bersifat sementara.

"Jangan sampai membuat kita menjadi sombong. Pada akhirnya, yang kita bawa menghadap Sang Pencipta hanyalah amal ibadah," ujarnya.

Pembangunan Masjid Al-Karim ini dinilai sebagai wujud nyata semangat gotong royong masyarakat. Inisiatif warga dalam merancang pembangunan, termasuk rencana fasilitas basement, menunjukkan kesiapan yang matang dalam mewujudkan rumah ibadah yang representatif.

Secara historis, masjid telah memainkan peran penting dalam peradaban Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi di Madinah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial masyarakat.

Di Indonesia, peran serupa juga terlihat dalam sejarah perkembangan Islam, seperti pada Masjid Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengembangan pendidikan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Tradisi ini terus

berkembang hingga kini, di mana masjid menjadi ruang interaksi sosial sekaligus pendidikan umat.

Dalam konteks global, lembaga berbasis masjid juga berkembang menjadi pusat pendidikan modern, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir yang berawal dari aktivitas keagamaan di lingkungan masjid dan kini menjadi salah satu institusi pendidikan Islam tertua di dunia.

Dengan latar historis tersebut, pembangunan Masjid Al-Karim di Wongko Lakudo diharapkan dapat mengikuti jejak peran strategis masjid dalam membangun peradaban masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat nilai keagamaan sekaligus mendorong kemajuan sosial.

Pemerintah daerah pun menilai pembangunan ini sebagai langkah awal dalam menciptakan pusat kegiatan keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan di Buton Tengah.

Ke depan, Masjid Al-Karim diharapkan menjadi simbol kebersamaan masyarakat serta menjadi motor penggerak pembangunan berbasis nilai spiritual dan pendidikan di wilayah tersebut. (*)

Sinergi Pemkab dan DWP Buton Perkuat Etika dan Karakter ASN Silaturahmi dan Seminar Kepribadian di Syawal



Pemerintah Kabupaten Buton bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia

Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berakar melalui kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan seminar kepribadian di Aula Kantor Bupati Buton, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan bertajuk "Membangun Diri, Menginspirasi Dunia: Kepribadian Positif untuk Masa Depan Gemilang" ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas individu aparatur dan masyarakat, khususnya perempuan, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Seminar kepribadian tersebut menghadirkan narasumber Nisrina Hamid, S.P., M.P., CMA., CPS., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kendari sekaligus praktisi media, yang menekankan pentingnya pengembangan diri sebagai fondasi kesuksesan.

"Kepribadian positif bukan hanya soal citra diri, tetapi menyangkut kemampuan beradaptasi, membangun relasi, dan memberi dampak," ujar Nisrina dalam pemaparannya.

Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan semacam ini memiliki akar historis kuat di Indonesia. Tradisi Halal Bihalal sendiri mulai berkembang secara nasional sejak era Presiden Soekarno pada 1948 sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan politik pasca kemerdekaan.

Seiring waktu, Halal Bihalal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial, bahkan

diadopsi dalam berbagai institusi pemerintahan dan organisasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Di tingkat global, konsep penguatan karakter dan pengembangan diri juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam agenda United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., yang membacakan sambutan Bupati Buton, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan. "Halal Bihalal ini bukan hanya tentang berjabat tangan dan saling memaafkan, tetapi bagaimana kita menyatukan niat untuk membangun daerah dengan integritas dan keikhlasan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya, bukan semata pada program atau anggaran.

"Kita membutuhkan pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, bekerja dengan nilai, dan mampu memberi arti dalam setiap tugas," katanya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Syawal sebagai titik awal memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jadikan ini sebagai awal baru untuk bekerja lebih tulus, melayani dengan sepenuh hati, dan hadir sebagai pribadi yang membawa manfaat," ucapnya.

Kegiatan ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-

Qur'an dan sari tilawah, dilanjutkan dengan tausiyah oleh Ustad Abdul Muin yang menekankan pentingnya menjaga keikhlasan dan mempererat ukhuwah Islamiyah pasca Idulfitri.

Pelaksanaan acara tersebut turut dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah dan Forkopimda, di antaranya perwakilan DPRD Buton, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, unsur kejaksaan, TNI, Polri, serta perwakilan Pengadilan Agama.

Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton sekaligus Penasehat DWP, Ny. Maimuna Moko Syarifudin, bersama para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, pengurus dan anggota DWP, serta Forum Anak Kabupaten Buton.

DWP sebagai organisasi yang menaungi istri aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat, terutama dalam membentuk karakter generasi yang berintegritas.

Dalam sejarahnya, organisasi perempuan di Indonesia, termasuk DWP, memiliki kontribusi penting sejak masa awal kemerdekaan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial berbasis keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Buton berharap tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat secara karakter dan nilai.

Kegiatan Halal Bihalal yang dipadukan dengan seminar kepribadian ini menjadi refleksi bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masa depan Kabupaten Buton yang gemilang. (*)

Aturan Baru Kemenkes Sasar Minuman Manis, Konsumsi Gula Berlebih Disorot, Label Nutri Level Mulai Diterapkan



Peliput: Lisna

JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pencantuman label gizi Nutri Level pada pangan siap saji sebagai langkah strategis menekan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebih di masyarakat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 yang diterbitkan pada Selasa, 14 April 2026, dan menyasar pelaku usaha skala besar, terutama pada produk minuman berpemanis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan informasi yang lebih transparan kepada konsumen agar mampu memilih produk yang lebih sehat.

"Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya," ujar Budi.

Ia menjelaskan, lonjakan kasus penyakit tidak menular di Indonesia tidak terlepas dari pola konsumsi masyarakat yang tinggi gula, garam, dan le-

mak. Penyakit seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2 menjadi ancaman serius dalam beberapa tahun terakhir.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menunjukkan peningkatan signifikan beban pembiayaan untuk penyakit terkait gaya hidup tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah pembiayaan gagal ginjal yang meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada 2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025.

"Empat penyakit dengan beban pembiayaan terbesar BPJS sangat berkaitan dengan konsumsi GGL yang berlebihan," kata Budi.

Dalam implementasinya, kebijakan ini mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label Nutri Level pada berbagai media informasi seperti menu, kemasan, brosur, hingga platform digital.

Sistem Nutri Level dibagi menjadi empat kategori, yakni Level A berwarna hijau tua dengan kandungan GGL paling rendah hingga Level D berwarna merah yang menunjukkan kandungan tertinggi.

Penilaian tersebut

dilakukan berdasarkan hasil uji laboratorium yang terakreditasi, kemudian dinyatakan secara mandiri oleh pelaku usaha sebagai bentuk transparansi informasi kepada konsumen.

Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warung makan sederhana atau pedagang kaki lima.

"Pada tahap awal, fokus kami adalah usaha skala besar agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif," ujarnya.

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kesehatan Indonesia yang mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan penyakit.

Dalam konteks tersebut, Kemenkes berperan mengatur pangan siap saji, sementara produk pangan olahan industri berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Secara historis, kebijakan pelabelan gizi bukan hal baru dalam upaya kesehatan publik. Sejumlah negara seperti Chile dan Inggris telah lebih dahulu menerapkan sistem label peringatan pada produk tinggi gula dan lemak, yang terbukti

mampu menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara signifikan.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia sejak lama merekomendasikan pembatasan konsumsi gula harian kurang dari 10 persen dari total asupan energi untuk mencegah penyakit tidak menular.

Sementara di Indonesia, upaya pengendalian konsumsi gula sebelumnya telah dilakukan melalui kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), namun dinilai belum optimal tanpa dukungan kebijakan berbasis informasi langsung pada produk.

Dengan penerapan Nutri Level ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih sadar terhadap kandungan gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

"UU Kesehatan mengamankan agar kebijakan lintas sektor diselenggarakan. Kemenkes bertanggung jawab mengatur pangan siap saji," kata Budi.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menekan angka penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Kerja Sama RI-Jepang Buka Akses Global Pendidikan Kedokteran

JAKARTA, BP-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat upaya peningkatan kualitas tenaga medis dengan menjalin kerja sama strategis bersama International University of Health and Welfare (IUHW) Jepang, yang difokuskan pada pengembangan pendidikan dokter spesialis berstandar internasional.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Cut Meutia Kemenkes RI, Jakarta, Senin (13/4/2026), yang melibatkan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Presiden IUHW Yasuhiro Suzuki, serta disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dalam konteks global, kolaborasi ini menjadi bagian dari tren internasional di mana negara berkembang memperkuat sistem kesehatannya melalui kemitraan pendidikan lintas negara, sebagaimana dilakukan berbagai negara Asia sejak dekade 2000-an untuk mengejar ketertinggalan tenaga spesialis.

Secara nasional, kebutuhan dokter spesialis di Indonesia masih tergolong tinggi. Data Kemenkes dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan rasio dokter spesialis yang belum merata, terutama di wilayah luar Pulau Jawa, sehingga kerja sama internasional menjadi salah satu solusi strategis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kontribusi Jepang selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem kesehatan Indonesia.

"Jepang sudah banyak membantu Indonesia dalam meningkatkan sistem kesehatan,

dan kerja sama ini kami harapkan menjadi legacy penting bagi masa depan kesehatan Indonesia," ujar Budi.

MoU ini menitikberatkan pada pengembangan pendidikan kedokteran, mulai dari pelatihan klinis pascasarjana hingga program pengembangan dokter spesialis dan fellowship, yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga medis secara menyeluruh.

Selain itu, kerja sama ini mencakup pertukaran akademik antara mahasiswa dan tenaga pengajar, serta pendampingan teknis oleh para ahli dari Jepang yang akan berkontribusi langsung dalam penguatan sistem pendidikan medis di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyatakan bahwa kerja sama ini dirancang untuk menjawab tantangan kebutuhan dokter spesialis secara berkelanjutan.

"Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu dokter, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan kesehatan secara keseluruhan," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan akan memperluas program pertukaran mahasiswa dan dosen serta meningkatkan kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di IUHW Jepang.

Presiden IUHW, Yasuhiro Suzuki, menilai kolaborasi ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang kesehatan.

"Kami siap mendukung Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan medis melalui kolaborasi akademik dan klinis yang berkelanjutan," ujarnya.

Secara historis, Jepang dikenal memiliki sistem pendidikan kedokteran yang kuat dan terintegrasi dengan layanan rumah sakit, yang telah berkembang

sejak reformasi medis era pasca-Perang Dunia II. Model ini menjadi rujukan bagi banyak negara dalam mengembangkan pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based).

Di Indonesia sendiri, upaya penguatan pendidikan dokter spesialis telah dilakukan sejak reformasi sistem kesehatan nasional, termasuk melalui peningkatan jumlah fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan, meski distribusi tenaga medis masih menjadi tantangan.


Saat ini, IUHW tercatat sebagai salah satu dari empat institusi pendidikan di Jepang yang diakui melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5/2026, yang memberikan kepastian hukum bagi lulusan Indonesia untuk memperoleh izin praktik setelah melalui evaluasi dan uji kompetensi sesuai regulasi.

Kemenkes juga tengah mengusulkan pengembangan skema double degree antara Indonesia dan Jepang, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global sekaligus mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Selain itu, penyelesaian masa pengabdian bagi penerima beasiswa juga menjadi perhatian pemerintah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan sistem kesehatan nasional.

Melalui kemitraan ini, kolaborasi antara IUHW dan rumah sakit pendidikan di Indonesia diharapkan semakin intensif, sehingga dapat mempercepat alih teknologi medis dan memperluas implementasi pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar transformasi kesehatan nasional yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan sektor kesehatan. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p>  <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruaoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Dugaan Suap Rp1,5 M, Ketua Ombudsman RI Resmi Jadi Tersangka



Ombudsman RI meminta maaf atas dugaan korupsi ketuanya, Hery Susanto, terkait tata kelola nikel di Sulawesi Utara.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Kejaksanaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Utara periode 2013-2025. Penetapan ini sekaligus diikuti dengan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti dugaan penerimaan uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI yang berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi khusus. Rekomendasi tersebut diduga bertujuan membatalkan kebijakan Kementerian Kehutanan terkait perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menanggapi kasus tersebut, pimpinan Ombudsman periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas peristiwa yang melibatkan pimpinan lembaga mereka.

"Pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031

menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," demikian pernyataan resmi lembaga tersebut, Kamis (16/4).

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan pelayanan publik. "Kami berkomitmen kuat untuk menjaga kepercayaan publik dengan penuh integritas," tulis pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Ombudsman menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan akan bersikap kooperatif dalam setiap tahapan penyidikan," tegas pernyataan itu.

Meski demikian, lembaga tersebut memastikan bahwa fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh kasus hukum yang menjerat ketuanya.

"Fungsi pengawasan pelayanan publik tetap ber-

jalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu," lanjut keterangan resmi tersebut.

Secara kelembagaan, Ombudsman juga telah menyiapkan langkah-langkah internal guna menjaga stabilitas organisasi selama proses hukum berlangsung.

Pimpinan Ombudsman periode 2026-2031 terdiri atas Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektora bersama tujuh anggota lainnya, yakni Abdul Ghoftar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia, khususnya pertambangan nikel yang dalam satu dekade terakhir menjadi komoditas strategis nasional seiring meningkatnya kebutuhan global untuk industri baterai kendaraan listrik.

Secara historis, pengelolaan tambang di Indonesia kerap menjadi sorotan sejak era reformasi, termasuk sejumlah kasus besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perizinan dan

tata kelola sumber daya alam.

Di tingkat global, praktik korupsi dalam sektor ekstraktif juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional seperti Transparency International, yang secara rutin menyoroti kerentanan sektor pertambangan terhadap praktik suap dan konflik kepentingan.

Dalam konteks Indonesia, peningkatan permintaan nikel dunia sejak kebijakan hilirisasi mineral beberapa tahun terakhir turut meningkatkan risiko penyimpanan dalam tata kelola industri tersebut.

Atas perbuatannya, Hery Susanto dijerat dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, sekaligus menguji komitmen institusi negara dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di tengah tekanan publik yang semakin tinggi. (*)

MK Dalam Polemik Kuota Internet Hangus, Operator Diminta Transparan



Hakim MK cecar operator seluler soal kuota internet hangus

JAKARTA -Persoalan kuota internet yang hangus kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami praktik tersebut dalam sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Delapan hakim konstitusi secara bergantian mengajukan pertanyaan kritis kepada operator seluler terkait dampak kebijakan itu terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/4), menghadirkan sejumlah operator seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison, serta Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia sebagai pihak terkait.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pentingnya kejelasan dasar hukum praktik penjualan kuota internet. Ia mempertanyakan apakah sistem kuota hangus memiliki rujukan internasional atau hanya bersumber dari kebijakan domestik.

"Ini rezim dari mana diperoleh. Tolong kalau ada rujukan internasional disampaikan, supaya jelas dan tidak seperti membeli 'kucing dalam karung' ujar Suhartoyo.

Isu keadilan menjadi perhatian utama dalam persidangan tersebut. Hakim Saldi Isra menilai internet kini telah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga kebijakan yang merugikan konsumen perlu dikaji ulang.

"Internet bukan lagi sekadar barang, tetapi jasa yang menyangkut kepentingan publik. Maka harus ada inovasi agar pengguna tidak dirugikan," kata Saldi.

Dalam perspektif ekonomi, Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyoroti besarnya

biaya pembangunan infrastruktur jaringan sebagai faktor yang memengaruhi harga layanan internet. Ia meminta operator memaparkan proporsi biaya tersebut secara transparan.

Daniel menilai, keterbukaan informasi terkait biaya infrastruktur penting untuk menilai kewajaran tarif yang dibebankan kepada masyarakat.

Sementara itu, Hakim Guntur Hamzah mengaitkan persoalan ini dengan prinsip tata kelola yang baik melalui konsep TAR-IF, yakni transparansi, akuntabilitas, responsivitas, independensi, dan keadilan.

"Di mana letak keadilan ketika kuota dibeli untuk 30 hari, tetapi secara praktik harus membeli lebih sering karena siklus tertentu," ujarnya.

Hakim Ridwan Mansyur menambahkan bahwa kebutuhan internet telah merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan kuota hangus dinilai berpotensi merugikan publik secara luas.

Ia mendorong adanya dialog antara regulator, operator, dan masyarakat guna mencari solusi yang berimbang.

Di sisi lain, Hakim Asrul Sani melihat adanya variasi produk dari operator yang memungkinkan akumulasi kuota. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas, meskipun tetap terbatas oleh syarat dan ketentuan tertentu.

Namun demikian, pertanyaan mendasar tetap muncul terkait keuntungan yang diperoleh operator dari kuota yang tidak terpakai.

Hakim Adies Kadir secara khusus meminta penjelasan rinci mengenai klaim kerugian operator akibat kuota hangus. Ia meminta simulasi konkret agar Mahkamah dapat memahami logika

bisnis di balik kebijakan tersebut.

"Tolong disimulasikan, bagaimana kuota tidak terpakai bisa menjadi beban kerugian," kata Adies.

Sejalan dengan itu, Hakim Enny Nurbaningsih mempertanyakan alokasi dana dari kuota yang telah dibayarkan pelanggan tetapi tidak digunakan. Ia meminta penjelasan transparan dari masing-masing operator.

Secara historis, praktik pembatasan masa aktif kuota internet tidak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa, regulator telekomunikasi telah mendorong kebijakan rollover data atau akumulasi kuota untuk melindungi konsumen. Di Indonesia sendiri, regulasi sektor telekomunikasi berkembang sejak liberalisasi industri pada awal 2000-an, yang membuka kompetisi antaroperator namun juga memunculkan variasi model bisnis, termasuk sistem kuota berbasis waktu.

Dalam konteks nasional, meningkatnya penetrasi internet yang menurut data beberapa tahun terakhir telah melampaui 70 persen populasi menjadikan isu ini semakin relevan. Internet tidak lagi sekadar layanan tambahan, melainkan infrastruktur penting bagi ekonomi digital.

Mahkamah dijadwalkan sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan tambahan dari para pihak, termasuk operator dan asosiasi, pada awal Mei mendatang. Perkara ini tercatat dalam register nomor 33/PUU-XXIV/2026 serta perkara terkait lainnya.

Putusan MK nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menyempangkan kepentingan industri telekomunikasi dan perlindungan konsumen di era digital. (*)

Baubau Jadi Rujukan Nasional, Koltim Dalami Strategi Kota Layak Anak



Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau untuk mempelajari strategi mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA)

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau untuk mempelajari strategi mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA), sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan anak di daerah tersebut, Jumat (10/04/2026).

Kunjungan yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kolaka Timur, Ferry Armeinus, bersama Sekretaris Daerah Rina Permatasari dan Sekretaris DP3A Trisnawati Binti Thayeb itu disambut langsung oleh Kepala DP3AKB Baubau Abdul Rahman beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kolaka Timur menaruh perhatian pada kesiapan Baubau menghadapi evaluasi KLA tahun 2026, termasuk penyusunan dokumen dan mekanisme penilaian yang kini sebagian dilakukan secara virtual.

Abdul Rahman menegaskan bahwa keberhasilan Baubau mempertahankan status KLA tidak terlepas dari kesiapan

teknis dan konsistensi dalam memenuhi indikator penilaian.

"Kami terus memperkuat dokumen pendukung serta memastikan seluruh indikator terpenuhi secara sistematis menjelang evaluasi 2026," ujarnya.

Selain kesiapan teknis, Baubau juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program perlindungan anak.

Menurut Abdul Rahman, sinergi tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

"Tanpa koordinasi lintas sektor, program perlindungan anak tidak akan berjalan optimal," katanya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan juga menjadi aspek penting, termasuk keberadaan regulasi, gugus tugas, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Secara substantif, Baubau telah memenuhi lima klaster utama penilaian KLA, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan

pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak.

"KLA adalah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh," tutur Abdul Rahman.

Sementara itu, Ferry Armeinus menyampaikan apresiasi atas capaian Baubau yang dinilai mampu menjadi contoh konkret bagi daerah lain dalam membangun ekosistem ramah anak.

"Kami berharap strategi yang kami pelajari di sini dapat segera diimplementasikan di Kolaka Timur," ujarnya.

Secara historis, program Kota Layak Anak di Indonesia mulai dikembangkan secara nasional sejak 2006 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak anak.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan komitmen global melalui UNICEF dalam mendorong konsep Child Friendly Cities yang telah diterapkan di berbagai negara sejak 1990-an.

Di tingkat nasional, jumlah kabupaten/kota yang meraih predikat KLA terus meningkat setiap tahun, mencerminkan kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya perlindungan anak.

Baubau sendiri mulai menunjukkan progres signifikan dalam pemenuhan indikator KLA hingga akhirnya berhasil meraih predikat tersebut pada 2024 dan berupaya mempertahankannya pada evaluasi berikutnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang studi tiru, tetapi juga memperkuat kolaborasi antardaerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan yang aman dan ramah.

Sebagai bagian dari strategi nasional dan global, penguatan KLA menjadi indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di masa depan. (*)

Baubau Siapkan Penampilan Unggulan di Event Harmoni Sultra 2026



Pemerintah Kota Baubau memastikan kesiapan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Harmoni Sultra 2026

Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memastikan kesiapan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Harmoni Sultra 2026 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulawesi Tenggara melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Jumat (10/4/2026). Kesiapan tersebut mencakup aspek teknis, sumber daya manusia, hingga dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan yang dipimpin Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, itu turut dihadiri Sekretaris Daerah La Ode Darus Salam serta Kepala Dinas Pariwisata Moh Idrus Taufik Saidi. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan strategi menghadapi agenda tahunan tingkat provinsi itu.

Dalam rapat tersebut ditegaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan diikuti secara penuh, mulai dari pameran di lapangan STQ, agenda di lokasi MTQ, hingga kegiatan di Pulau Bokori dan olahraga sepeda santai di jalur Bypass. Setiap agenda telah memiliki penanggung jawab guna memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Wakil Wali Kota menilai partisipasi Baubau dalam Harmoni Sultra bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menampilkan capaian pembangunan daerah. "Kehadiran kita harus memberi pesan kuat tentang kualitas daerah, bu-

kan sekadar formalitas," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh OPD dalam mendukung keberhasilan penampilan daerah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

"Sebagai salah satu kota di Sulawesi Tenggara, kita memiliki standar tinggi yang harus dijaga. Penampilan kita harus mencerminkan prestasi yang sudah diraih," kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat beririsan dengan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Pemkot Baubau tetap optimistis dapat tampil maksimal. Kreativitas dan efisiensi anggaran menjadi pendekatan utama dalam menyesuaikan kondisi tersebut.

"Anggaran bukan alasan untuk tampil seadanya. Kita harus kreatif dan mengoptimalkan potensi yang ada," tambahnya.

Sekda Baubau, La Ode Darus Salam, dalam forum tersebut juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan teknis dari masing-masing kegiatan. Ia memastikan seluruh dukungan administratif dan koordinatif akan diupayakan secara maksimal.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis yang mengidentifikasi berbagai kebutuhan mendesak, termasuk kesiapan stand pameran, materi promosi, hingga penampilan seni budaya.

Secara historis,

partisipasi daerah dalam event semacam ini memiliki peran penting dalam memperkuat identitas lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Di tingkat nasional, kegiatan serupa seperti Pekan Raya Jakarta telah terbukti menjadi ajang promosi daerah dan peningkatan investasi.

Sementara di tingkat internasional, festival budaya seperti Edinburgh Festival Fringe menunjukkan bagaimana kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi dapat menjadi motor penggerak pariwisata serta diplomasi budaya.

Mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya di Kabupaten Kolaka, Baubau mencatat respons positif dari masyarakat terhadap penampilan stand pameran dan kesenian daerah. Capaian tersebut menjadi tolok ukur sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas pada tahun ini.

Selain OPD, peran Tim Penggerak PKK dan Dekranasda dinilai krusial dalam memperkuat representasi produk lokal dan kerajinan daerah. Pemerintah kota memastikan dukungan penuh agar kedua lembaga tersebut dapat tampil optimal.

Dengan strategi kolaboratif dan pendekatan kreatif, Pemkot Baubau menargetkan partisipasi dalam Harmoni Sultra 2026 tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu memperkuat citra daerah sebagai kota unggulan di jazirah Sulawesi Tenggara. (*)